

BAB III

METHODOLOGY PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Arikunto (2002:120) mengemukakan penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau

Sugiyono (2014:147) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Kasiran (2008) menyatakan pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti.

3.2. Obyek dan Sumber Data Penelitian

3.2.1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata, dengan mengambil data di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.

3.2.2. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Menurut Anton Dajan (1991)

yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata pada Provinsi NTT Tahun 2015-2019
2. Data Realisasi Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata pada Provinsi NTT Tahun 2015-2019
3. Data Badan Statistik Keuangan Kabupaten Lembata Provinsi NTT Tahun 2015-2019

3.3. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan daerah yang terdiri dari :

3.3.1. Derajat Desentralisasi

Menurut Halim (2009:1), Desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberi pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang , wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk melakukan hal-hal seperti kewenangan memungut pajak , terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat,dan lain sebagainya.

Menurut Sidik (2003) dalam Halim (2009:1) Desentralisasi dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu : *pertama*, desentralisasi politik , yakni pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik. *Kedua*, desentralisasi administrative, yakni pelimpahan wewenang tanggungjawab, dan sumber-sumber keuangan untuk penyediaan pelayanan publik. *Ketiga*, desentralisasi fiskal, yakni pelimpahan kewenangan yang mencakup *self financing* atau *cost recovery* dalam pemberian pelayanan publik, *confinancing* atau *coproduction* dari pengguna jasa publik, peningkatan taxing power , transfer dan bagi hasil , serta kewenangan dalam kebebasan melakukan pinjaman. Keempat, desentralisasi

ekonomi, yakni kewenangan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi yang bertitik berat pada efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik melalui liberalisasi, privatisasi dan deregulasi ,yang sejalan dengan ekonomi pasar.

3.3.2. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawab sendiri. Dalam hal organisasi pemerintah, pemerintah daerah tergantung pada dana yang yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi.

Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap rasio ketergantungan kauangan daerah menurut tim fisipol UGM dan balitbang depdagri (1991) dalam Bisma dan Susanto (2010:77), adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Persentase Pendapatan

Transfer	Ketergantungan Keuangan
Terhadap Total Pendapatan	Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01- 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

sumber: Tim Litbang Depdagri – fisipol UGM, 1991(dalam Bisma dan Susanto:2010)

3.3.3. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian berarti mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan pihak eksternal, dan mampu untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Untuk mengetahui kemandirian suatu organisasi maka perlu untuk melakukan pengukuran, dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

Kriteria yang dapat digunakan untuk melihat pola hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menurut Thoha (1991) dan Reksohadiprojo (1999) dalam Latuny (2016:98-99), adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap

transfer	Kemandirian	Pola hubungan
pusat+provinsi+pinjaman		
0–25	Sangat rendah	Instruksi
26 -50	Rendah	Konsultatif
51–75	Sedang	Partisipatif
76 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Thoha (1991) (dalam Latuny:2016)

3.3.4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *outcome*. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014:191).

Kriteria untuk mengetahui nilai efektivitas pajak daerah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan pajak

Daerah Terhadap Target Penerimaan

Pajak Daerah

Efektifitas pajak

Daerah

>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010: 143)

3.3.5. Rasio efisiensi pajak daerah

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi penerimaan daerah. (Mahsun, 2014: 189).

Kriteria untuk mengetahui nilai efisiensi pajak daerah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria rasio Efisiensi Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan pajak Daerah Terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah	Efisiensi pajak Daerah
<10	Sangat Efisien
10-20	Efisien
21-30	Cukup Efisien
31-40	Kurang efisien
>40	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2010: 143)

3.3.6. Rasio keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dengan demikian pemerintah daerah perlu

untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan baik (Mahmudi, 2010: 162).

Menurut Mahmudi (2010: 164), rasio keserasian antara lain berupa:

3.3.6.1. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi

3.3.6.2. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

3.3.7. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengetahui rasio ini tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Suatu Pemerintah Daerah telah melaksanakan efisiensi belanja apabila rasio ini kurang dari 100%, namun jika rasio lebih dari 100%, berarti tidak efisien (Mahmudi, 2010:166).

3.3.8. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal).

3.3.8.1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran.

3.3.8.2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik.

3.4. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode Dokumentasi. Dokumentasi adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan abash. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. Data yang diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa: gambaran umum Kabupaten Kebumen dan gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata. Sedangkan data khusus berupa Laporan Keuangan Kabupaten Lembata dan Laporan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2018-2019.

3.4. Metode Analisis

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis keuangan daerah menurut Mahmudi (2010), adalah sebagai berikut :

3.4.1. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.4.2. Rasio ketergantungan keuangan daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.4.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat} + \text{propinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

3.4.4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Pajak} \\ = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

3.4.5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Pajak} \\ = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

3.4.6. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

3.4.7. Rasio Keserasian

Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

3.4.7.1. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

3.4.7.2. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.4.8. Rasio Pertumbuhan

3.4.8.1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PAD}_{t-1} - \text{PAD}_{t-2})}{\text{PAD}_{t-2}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{(TPT_t - TPT_{t-1})}{TPT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PADT_t$: Pendapatan asli daerah tahun_t

$PADT_{t-1}$: pendapatan asli daerah tahun_{t-1}

$PADT_t$: total pendapatan tahun_t

$PADT_{t-1}$: total pendapatan tahun_{t-1}

3.4.8.2. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{(BOT_t - BOT_{t-1})}{BOT_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{(BMT_t - BMT_{t-1})}{BMT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

BOT_t : Belanja Operasi Tahun_t

BOT_{t-1} : Belanja Operasi Tahun_{t-1}

BMT_t : Belanja Modal Tahun_t

BMT_{t-1} : Belanja Modal Tahun_{t-1}